

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI..... iv

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... xiv

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN xv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Rumusan Masalah..... 11

 1.3 Tujuan Penelitian 11

 1.4 Manfaat Penelitian 11

 1.5 Metode Penelitian 12

 1.5. 1 Tipe Penelitian 12

 1.5. 2 Tipe Pendekatan Masalah 12

 1.5. 4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 14

 1.5. 5 Analisis Bahan Hukum 15

 1.5. 6 Pertanggungjawaban Sistematika 15

**BAB II HAK SUARA DI DALAM PERDAMAIAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)..... 18**

2.1 Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Umum	18
2.2 Proses Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	25
2.3 Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Perdamaian PKPU	32
2.4 Homologasi Perdamaian PKPU	49
BAB III UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR PREFEREN YANG DIRUGIKAN DALAM HOMOLOGASI PERDAMAIAN PKPU	56
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU	56
3.2 Legal Standing Kreditor Dalam Pengajuan Permohonan Pembatalan Perdamaian PKPU	64
3.3 Kajian Kasus Pembatalan Perdamaian PKPU PT. Kertas Leces .	72
3.3.1 Kasus Posisi	72
3.3.2 Pertimbangan dan Putusan Hakim.....	75
3.3.3 Analisa Putusan	80
3.4 Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perdamaian PKPU Karena Debitor Dinyatakan Lalai	85
BAB IV PENUTUP.....	88
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran.....	90

DAFTAR BACAAN..... 92

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara 4443)
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 39, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4279)
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 85, tambahan lembaran Negara republik indoensia nomor 4740)
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5618)
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia ThauN 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3612)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 67/PUU-XI/2013
2. Putusan Pengesahan Perdamaian PKPU Pengadilan Niaga Surabaya
Nomor : 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.
3. Putusan Pembatalan Perdamaian No.1/Pdt.Sus.Pembatalan
Perdamaian/2018/PN Niaga Sby
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019